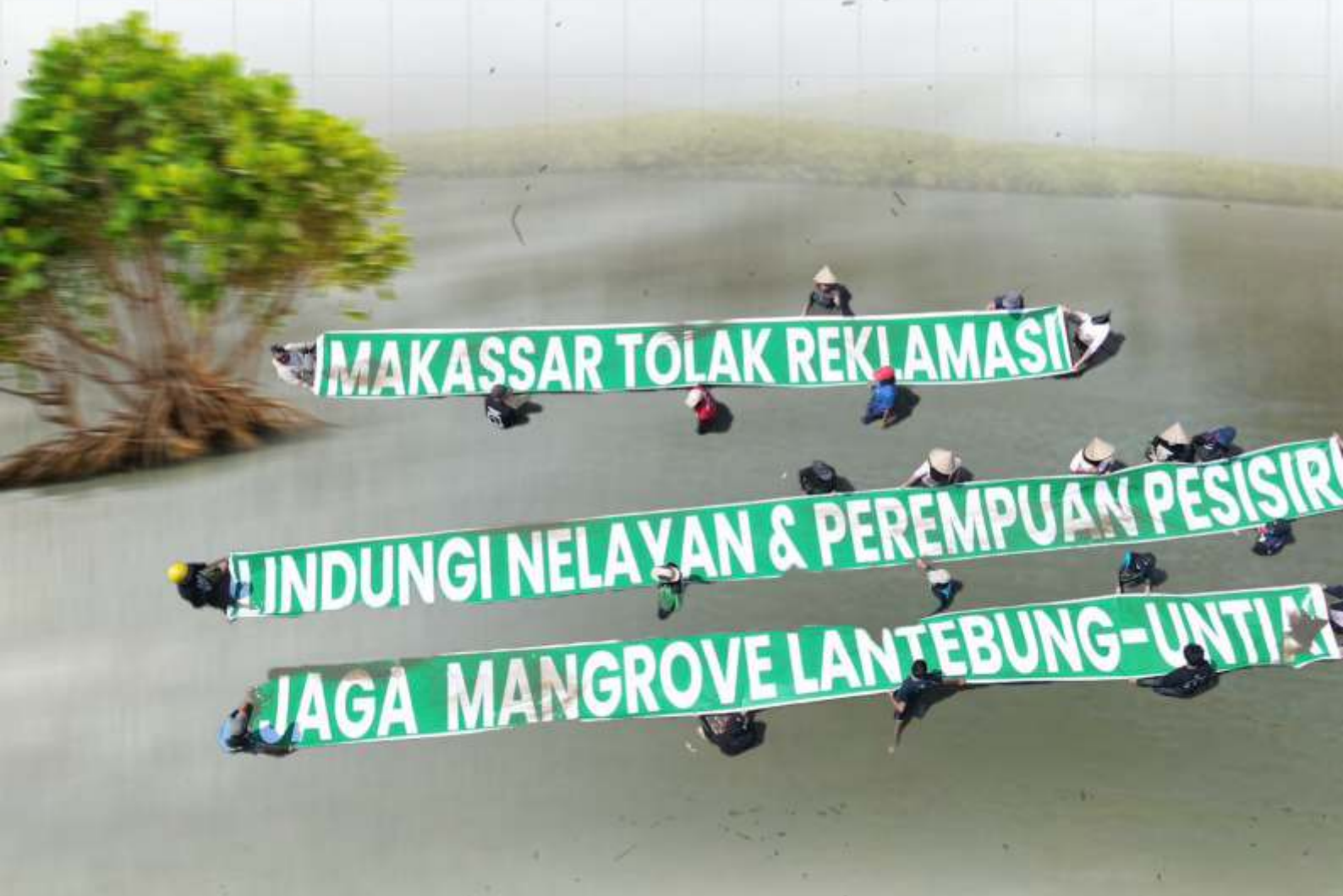


PERLINDUNGAN RUANG HIDUP KAWASAN PESISIR UTARA KOTA MAKASSAR

Laporan Riset Feminist Participatory Action Research (FPAR)
atas Kondisi Infrastruktur dan Ancaman Reklamasi bagi Kehidupan
Nelayan dan Perempuan Pesisir Untia

2026







PERLINDUNGAN RUANG HIDUP KAWASAN PESISIR UTARA KOTA MAKASSAR

Laporan Riset Feminist Participatory Action Research (FPAR)
atas Kondisi Infrastruktur dan Ancaman Reklamasi bagi Kehidupan
Nelayan dan Perempuan Pesisir Untia

Peneliti

Fadila Abdullah
Anugrah Gani
Akbar
Rahayu
Sinta Eka Putri

Editor

Slamet Riadi

Layouter

Fitrah Yusri

Diterbitkan oleh

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan
Jalan Aroepala, Kompleks Permata Hijau Lestari, Blok Q1 No.8, Makassar
Indonesia
+628229 393 9591
+62411 467 1368
walhisulsel@gmail.com
www.walhisulsel.or.id

Both ENDS
Nobelstraat 4
3512 EN Utrecht
The Netherlands
info@bothends.org

Juli, 2026





Bagian I

Pendahuluan & Konteks Kebijakan Tata Ruang Pesisir
Kota Makassar

1.1 Posisi Yuridis dan Rencana Makro Wilayah Pesisir

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama DPRD telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041. Regulasi ini secara eksplisit mengintegrasikan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ke dalam tata ruang provinsi guna menyinkronkan pemanfaatan ruang darat dan laut. Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) mengenai Ruang Lingkup Wilayah Laut, ruang laut Sulawesi Selatan mencakup empat wilayah perairan utama: Selat Makassar, Laut Flores, Laut Jawa, dan Teluk Bone, serta melingkupi 332 pulau.

Dalam hirarki pusat pertumbuhan, Kota Makassar ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Perkotaan Mamminasata yang berstatus Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN). Pasal 5 huruf b angka 2 menetapkan kebijakan peningkatan pelayanan dan pertumbuhan ekonomi di tiga zona sekaligus: wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

1.2 Alokasi Spasial Pesisir Kota Makassar

Berdasarkan rencana pola ruang laut yang tertuang dalam Perda No. 3 Tahun 2022, wilayah pesisir Kota Makassar dihadapkan pada penetapan beberapa zona yang masif dan tumpang tindih:

- **Infrastruktur & Transportasi:** Rencana Pelabuhan Utama Makassar (*Makassar New Port*) (Pasal 22), zona alur pelayaran laut dan perlintasan kapal (Pasal 23), serta rencana jaringan tol pesisir pantai Makassar-Takalar.
- **Kawasan Budi Daya:** Zona Industri Pengolahan Ikan dan Maritim, Zona Perdagangan Jasa, Zona Perikanan Tangkap (KPU-PT), serta Kawasan Budidaya Perikanan Terpadu yang diwajibkan menggunakan teknologi ramah lingkungan (Pasal 9 ayat (1) huruf c).
- **Kawasan Konservasi & Lindung:** Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir (KPU-M) yang mewajibkan konservasi dan rehabilitasi hutan mangrove (Pasal 8 ayat (3) dan (4)), serta status Kawasan Lindung untuk ruang laut bernilai ekologis tinggi (Pasal 40).

1.3 Rekam Jejak Reklamasi di Kota Makassar

Di balik megahnya gedung-gedung modern yang berdiri diatas tanah urukan Kota Makassar, ada cerita tersembunyi yang perlahan terkubur bersama ombak. Reklamasi pesisir bukan sekadar proyek semen dan pasir, ia adalah kisah tentang hilangnya ruang hidup, rusaknya ekosistem dan beban berat yang harus dipikul oleh pundak perempuan pesisir.

WALHI Sulawesi Selatan mencatat dan merekam jejak nyata bagaimana proyek megah di pesisir ini perlahan mengubah takdir komunitas nelayan setempat. Ada luka yang belum sembuh, mulai dari pesisir wilayah *Centre Point of Indonesia* (CPI) Makassar, hingga *Makassar New Port* (MNP).

Ketika mega proyek CPI mulai menimbun laut pada tahun 2014, Wilayah tangkap nelayan tradisional seketika berubah menjadi daratan beton. Alat tangkap seperti jaring dan rumpon tertimbun. Dampaknya tidak berhenti disitu, pembangunan MNP memperluas skala kehancuran ekologis ini ke utara kota.

Pencarian material pasir untuk MNP di perairan Spermonde (seperti wilayah *Copong* di dekat Pulau Kodingareng) memicu trauma ekologis yang mendalam:

- **Kerusakan Laut & Kerugian Ekonomi:** Berdasarkan riset Koalisi Save Spermonde bersama WALHI Sulsel, aktivitas pengerukan pasir mengubah pola arus, memicu abrasi pantai, serta merusak terumbu karang akibat sedimentasi tebal. Nelayan tradisional yang biasanya bisa membawa pulang hingga 40 ekor ikan tenggiri per hari, pasca-penambangan sering kali hanya mendapati 1 hingga 2 ekor saja. WALHI Sulsel mencatat total kerugian ekonomi nelayan mencapai puluhan miliar rupiah akibat lumpuhnya ruang tangkap ini.
- **Ancaman Penggusuran Ruang Hidup:** Di kawasan pesisir Cambaya, Buloa, dan Tallo, ratusan kepala keluarga terus dibayangi ancaman kehilangan tempat tinggal yang berbatasan langsung dengan proyek pelabuhan terpadu tersebut.

Hal itu memberi dampak beban berlapis kepada perempuan pesisir, pelaku utama kehidupan warga pesisir yang terabaikan. Jika laut adalah urat nadi nelayan, maka bagi perempuan pesisir, laut adalah ruang kedaulatan pangan sekaligus penyambung hidup keluarga. Saat reklamasi berjalan, perempuan menjadi kelompok yang paling rentan mengalami dampak berlapis.

"Tempat kami mencari tude (kerang) dan kanjappang dipatok tengah malam oleh orang tidak dikenal... orang proyek bilang, di sini mau dibangun tanggul, tidak bisa lagi mencari di lokasi ini". Cerita dari perempuan di wilayah Kecamatan Tallo saat itu.

WALHI Sulsel bersama organisasi kemitraan mencatat bahwa setidaknya **ratusan perempuan pesisir dan pencari kerang (patude) kehilangan akses total terhadap wilayah kelola mereka**. Ketika pesisir dipatok dan ditimbun, ruang hidup mereka lenyap.

Dampaknya menciptakan efek domino yang memukul kehidupan domestik perempuan:

1. **Kehilangan Sumber Pangan Mandiri:** Mereka tidak lagi bisa langsung turun ke laut dangkal untuk mengambil pangan bagi konsumsi keluarga.
2. **Jam Kerja yang Membengkak:** Demi menyalahi pendapatan suami (nelayan) yang anjlok akibat rusaknya ekosistem laut, para perempuan terpaksa bekerja melampaui batas waktu normal mencari nafkah alternatif, sementara tugas domestik rumah tangga tetap melekat pada mereka.
3. **Krisis Finansial & Psikologis:** Banyak keluarga terjatuh utang atau bahkan terpaksa merantau keluar pulau demi bertahan hidup, memisahkan struktur sosial komunitas yang telah terjaga turun-temurun.

Kini jejak kelam di CPI dan MNP menjadi alarm keras bagi wilayah pesisir utara Makassar, tepatnya di Kelurahan Untia dan kawasan penyangga Lantebung. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sedang menyusun rencana reklamasi pesisir Untia dengan konsep daratan terpisah berbentuk pulau-pulau buatan. Meski pemerintah menjanjikan proteksi terhadap ekosistem mangrove dan ruang gerak nelayan, kekhawatiran besar tetap menyelimuti warga.

Kawasan Untia dan Lantebung adalah benteng hijau terakhir Makassar. Menimbun laut di wilayah ini, sekecil apapun jaraknya dari garis pantai, berisiko mengulang kesalahan yang sama: memutus akses nelayan, mengancam hutan mangrove yang menjadi tempat pemijahan ikan, serta merampas kembali ruang hidup perempuan pesisir.

Melalui gerakan penanaman mangrove dan aksi kolektif, warga sipil dan aktivis lingkungan mengirimkan pesan satu suara yang tegas: **menolak reklamasi pesisir utara**. Belajar dari CPI dan MNP, menjaga laut bukan sekadar mempertahankan bentang alam, tapi juga menjaga martabat, keadilan, dan nafas kehidupan para perempuan serta nelayan tradisional yang menggantungkan hidup padanya.



Bagian II

Analisis Data & Pembahasan Temuan

2.1 Sejarah Perkampungan Pesisir Untia

Masyarakat Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, memiliki sejarah panjang terkait pergeseran ruang hidup akibat pembangunan pesisir. Ibu Jamrud, salah satu warga lokal yang menetap sejak akhir dekade 1990-an, menjadi saksi bagaimana pemukiman pesisir ini tumbuh secara bertahap dari kawasan terisolasi hingga menjadi bagian dari struktur administratif Kota Makassar.

Kronologi Relokasi dan Perkembangan Pemukiman

Perkembangan Kampung Untia tidak lepas dari proyek pembangunan dan penataan kawasan Pantai Losari pada masa lalu.

1. Relokasi Warga (1997–1998)

Sebanyak 120 kepala keluarga (KK) yang sebelumnya bermukim di Pulau Lae-Lae dan kawasan pesisir Losari dipindahkan ke Untia. Saat itu, Untia masih berupa unit Rukun Warga (RW) yang berada di bawah naungan Kelurahan Bulurokeng (yang kemudian masuk wilayah Kelurahan Bira). Proses penempatan permukiman terjadi secara spontan tanpa pemetaan tanah yang terstruktur, yang kemudian memicu ketidaksesuaian administrasi pertanahan antara sertifikat dan posisi fisik rumah warga.

2. Pembentukan Kelurahan Mandiri (2002)

Melalui dorongan masyarakat lokal dan fasilitasi pemangku kepentingan daerah, Untia secara resmi dimekarkan menjadi kelurahan terpisah pada tahun 2002. Untia tercatat sebagai kelurahan ke-143 di Kota Makassar.

3. Pembangunan Infrastruktur Publik

Fasilitas dasar di Untia mengalami peningkatan secara bertahap. Pada masa awal relokasi, sarana transportasi sangat terbatas dan akses penyeberangan hanya mengandalkan jembatan kayu berdesain melengkung agar perahu nelayan dapat melintas di bawahnya.

Pasca-kunjungan kerja Presiden Joko Widodo pada periode 2014–2015, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, meliputi:

- Betonisasi jalan lingkungan dan perbaikan drainase/kanal.
- Pembangunan fasilitas pendidikan dan sosial, seperti SMK Negeri 9 Makassar, Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP), dan Panti Rehabilitasi Dinas Sosial.
- Pembangunan Kantor BMKG serta Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Untia.

Pada tahun 2020 - 2026 Transformasi Sosial dan Infrastruktur di Untia pascapandemi:

- Pembangunan Rumah Rakyat dan Sekolah Rakyat
- Pembangunan Koperasi Merah Putih
- Perkembangan akses jalan

Rehabilitasi Ekosistem Mangrove

Pada awal masa relokasi, kondisi geografis pesisir Untia relatif minim vegetasi pelindung. Kondisi ini membuat permukiman warga, khususnya di wilayah Blok A, rentan terhadap kerusakan akibat angin barat dan gelombang pasang.

Untuk mengurangi risiko bencana pesisir, warga lokal bersama tokoh masyarakat menginisiasi penanaman pohon mangrove secara swadaya. Usaha ini kemudian mendapat dukungan program

penanaman dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat.

Secara teknis lingkungan, keberadaan hutan mangrove di Untia saat ini berfungsi sebagai: Pemecah gelombang alami yang meredam dampak abrasi di garis pantai, pelindung fisik bangunan pemukiman dari paparan angin kencang, dan habitat pemijahan (nursery ground) bagi biota laut dangkal yang menjadi komoditas tangkapan nelayan skala kecil.

Analisis Dampak Rencana Reklamasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merencanakan perluasan kawasan industri dan infrastruktur pesisir melalui proyek reklamasi di wilayah pesisir Makassar, termasuk area yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Untia.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merencanakan perluasan kawasan industri dan infrastruktur pesisir melalui proyek reklamasi di wilayah pesisir Makassar, termasuk area yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Untia.

Berdasarkan kajian advokasi dan data dari **Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan**, rencana reklamasi pesisir memiliki sejumlah konsekuensi teknis dan sosial:

1. **Pengulangan Pola Dislokasi:** Warga Untia yang sebelumnya merupakan korban relokasi akibat penimbunan pesisir di kawasan Losari kini berpotensi menghadapi perubahan ruang hidup serupa di pemukiman mereka saat ini.
2. **Perubahan Hidro-Oseanografi:** Penimbunan laut berisiko mengubah pola arus air, meningkatkan laju sedimentasi, dan merusak ekosistem mangrove yang telah ditanam.
3. **Dampak Ekonomi Nelayan:** Aktivitas pengerukan dan penimbunan menambah tingkat keruh air (turbidity), yang menurunkan populasi ikan tangkapan di kawasan pesisir dangkal. Kondisi ini memaksa nelayan melaut lebih jauh ke tengah laut, yang berimplikasi pada peningkatan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

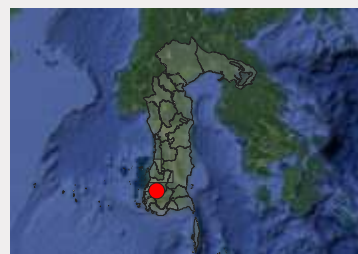
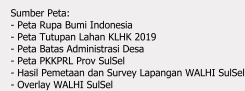
Masalah Administrasi dan Layanan Dasar yang Belum Tuntas

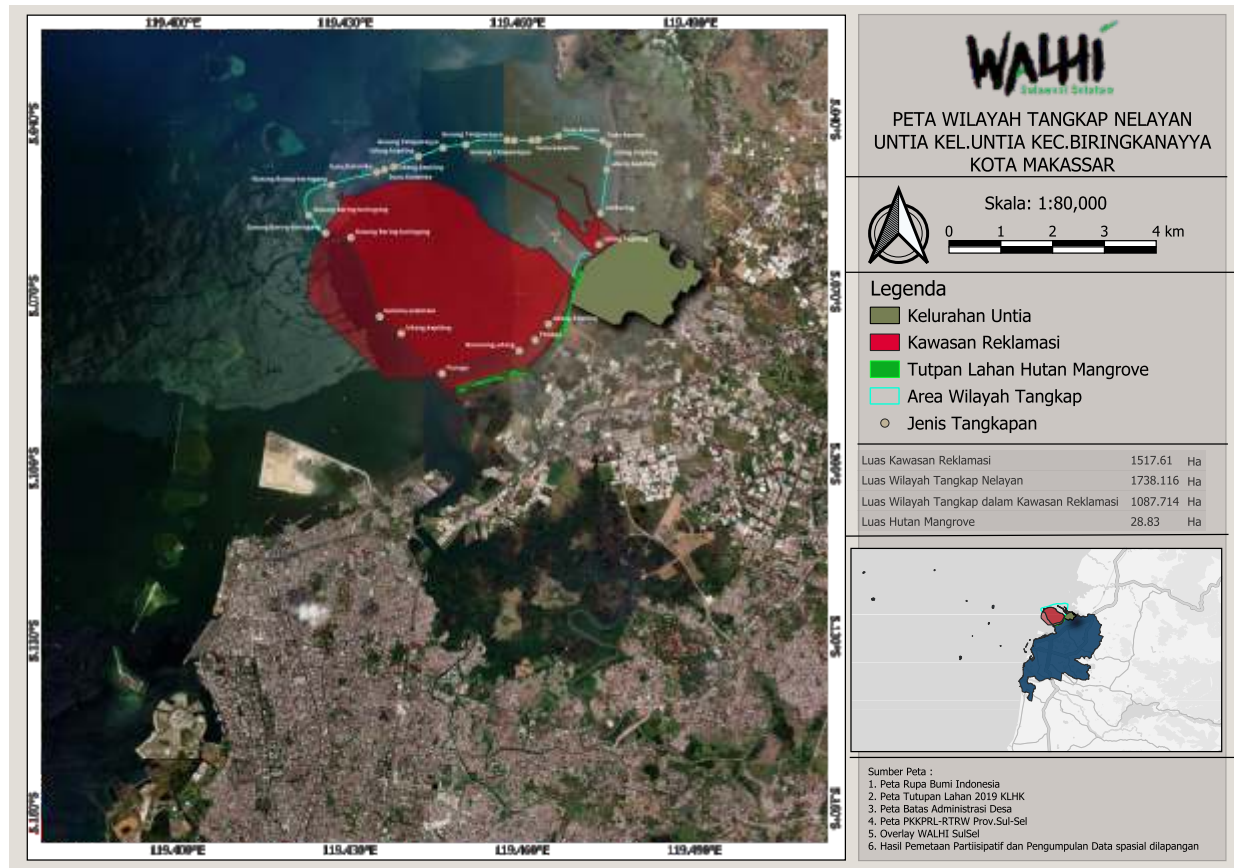
Meski infrastruktur fisik mengalami perkembangan, warga Untia masih menghadapi dua kendala utama:

- **Kepastian Legalitas Lahan (Alas Hak):** Masalah kepemilikan tanah belum terselesaikan secara menyeluruh. Dari total kuota penerbitan sertifikat tanah yang direncanakan pemerintah, baru sekitar 102 sertifikat yang telah terdistribusi kepada warga dari target 200 kuota. Sebagian besar warga belum memiliki dokumen kepemilikan tanah yang sah secara hukum.
- **Akses dan Kualitas Air Bersih:** Suplai air bersih dari PDAM belum terdistribusi secara konsisten. Ketersediaan air bersih menjadi kebutuhan mendasar bagi pemukiman pesisir guna mencegah masalah kesehatan dan intrusi air asin pada sumber air warga



Kelurahan Untia merupakan salah satu kampung nelayan tradisional yang tersisa di Kota Makassar dengan benteng alami berupa ekosistem mangrove. Namun, ruang hidup ini beririsan langsung dengan rencana proyek reklamasi seluas 1.440 hektare. Ketika regulasi formal menekankan pada efisiensi ekonomi berskala nasional (PKN/KSN), masyarakat nelayan di akar rumput menghadapi hambatan akses wilayah tangkapan akibat alur pelayaran, risiko penggusuran akibat ekspansi industri, serta degradasi ekosistem.





Riset ini menggunakan pendekatan Feminist Participatory Action Research (FPAR) untuk mendokumentasikan dampak gender secara spesifik di Kelurahan Untia, menggalang posisi tawar kolektif perempuan, serta menghasilkan data tandingan (counter-data) akar rumput guna menguji kesesuaian implementasi regulasi tata ruang dengan realitas sosiologi masyarakat lokal.

Pesisir Kelurahan Untia, adalah salah satu kawasan yang masih menjadi ruang produksi utama bagi nelayan tradisional. Hasil pemetaan partisipatif menunjukkan bahwa nelayan memanfaatkan perairan pesisir untuk menangkap berbagai komoditas, terutama ikan, udang, dan kepiting, yang tersebar pada kawasan perairan dangkal, sekitar gosong pasir, hingga area yang berdekatan dengan ekosistem mangrove. Selama ini, ruang laut itu tidak sekadar lokasi penangkapan ikan, melainkan bagian dari sistem kehidupan masyarakat yang terbentuk melalui pengalaman panjang.

Peta wilayah tangkap memperlihatkan luas area penangkapan nelayan mencapai 1.738,116 hektare. Namun, pada ruang yang sama terdapat kawasan reklamasi seluas 1.517,61 hektare yang menempati sebagian besar perairan pesisir Untia. Analisis spasial menunjukkan bahwa 1.087,714 hektar wilayah tangkap berada di dalam kawasan reklamasi. Artinya, sekitar 62,6% dari seluruh wilayah tangkap nelayan mengalami tumpang tindih dengan area reklamasi.

Besarnya luasan tumpang tindih tersebut menunjukkan bahwa reklamasi tidak hanya mengubah konfigurasi garis pantai, tetapi juga mengurangi ruang akses nelayan terhadap lokasi-lokasi penangkapan yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka. Potensi hilangnya sebagian ruang tangkap akan memaksa nelayan mencari lokasi alternatif yang umumnya berada lebih jauh dari pesisir. Jika demikian, maka hal itu juga akan berdampak pada meningkatnya waktu pelayaran, konsumsi bahan bakar, serta biaya operasional penangkapan. Dalam skala rumah tangga nelayan, peningkatan biaya produksi berpotensi menurunkan efisiensi usaha penangkapan dan memengaruhi pendapatan.

Selain berdampak terhadap akses ruang, reklamasi juga berpotensi mengubah kondisi biofisik

perairan. Aktivitas penimbunan dan perubahan morfologi pantai dapat memengaruhi pola arus, sirkulasi air, dan distribusi sedimen di kawasan pesisir. Perubahan tersebut berpengaruh terhadap kualitas habitat berbagai organisme akuatik, terutama biota yang bergantung pada perairan dangkal sebagai tempat mencari makan, berkembang biak, maupun tumbuh sebelum bermigrasi ke perairan yang lebih terbuka. Penurunan kualitas habitat pada akhirnya dapat mengurangi produktivitas sumber daya perikanan yang menjadi target penangkapan nelayan.

Kondisi itu sangat penting mengingat kawasan Untia masih memiliki tutupan hutan mangrove seluas 28,83 hektare. Walaupun luasnya relatif kecil dibandingkan kawasan reklamasi, mangrove memiliki fungsi ekologis yang sangat penting sebagai nursery ground, feeding ground, dan spawning ground bagi berbagai jenis ikan, udang, dan kepiting. Rencana reklamasi di sekitar kawasan pesisir berpotensi mengganggu konektivitas antara ekosistem mangrove dan perairan pesisir, sehingga mengurangi kemampuan habitat tersebut dalam mendukung regenerasi sumber daya perikanan.

Dari perspektif spasial, peta ini menunjukkan bahwa konflik yang muncul bukan semata-mata antara daratan hasil reklamasi dan laut, melainkan antara perubahan pemanfaatan ruang dengan ruang produksi masyarakat pesisir. Ketika lebih dari enam puluh persen wilayah tangkap berada dalam area reklamasi, maka perubahan fungsi ruang laut secara langsung memengaruhi keberlanjutan aktivitas perikanan tradisional. Dampaknya tidak hanya berupa penyusutan area penangkapan, tetapi juga perubahan pola melaut, peningkatan biaya operasional, penurunan efisiensi usaha, serta potensi berkurangnya hasil tangkapan akibat perubahan kondisi ekologis perairan.

Hal penting selanjutnya adalah dampak reklamasi tidak hanya dirasakan oleh nelayan laki-laki yang melakukan penangkapan di laut, tetapi juga oleh perempuan nelayan yang berperan dalam rantai nilai perikanan rumah tangga. Di Kelurahan Untia, perempuan terlibat dalam berbagai aktivitas pasca panen, seperti membersihkan dan menyortir hasil tangkapan, serta mengelola keuangan keluarga nelayan. Ketika reklamasi menyebabkan penyusutan wilayah tangkap dan berpotensi menurunkan hasil tangkapan, perempuan menjadi kelompok yang turut menanggung konsekuensi ekonomi. Berkurangnya volume hasil tangkapan berarti berkurangnya bahan baku untuk diolah dalam kebutuhan rumah tangga, maupun dijual. Sehingga pendapatan rumah tangga menurun dan ruang ekonomi yang selama ini dikelola perempuan menjadi semakin terbatas. Pada saat yang sama, mereka sering kali harus menyesuaikan strategi ekonomi keluarga, baik dengan meningkatkan efisiensi pengeluaran maupun mencari sumber pendapatan tambahan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Artinya, hasil pemetaan ini memberikan bukti spasial bahwa rencana reklamasi di pesisir Untia memiliki implikasi yang nyata terhadap sistem penghidupan nelayan. Data mengenai luas wilayah tangkap (1.738,116 ha), luas kawasan reklamasi (1.517,61 ha), dan luas wilayah tangkap yang terdampak reklamasi (1.087,714 ha) menunjukkan bahwa pembangunan pesisir perlu mempertimbangkan keberadaan ruang tangkap sebagai bagian dari sumber daya publik yang menopang ekonomi masyarakat. Integrasi data spasial ke dalam proses perencanaan menjadi penting agar pembangunan pesisir tidak hanya berorientasi pada perubahan fisik kawasan, tetapi juga mampu menjaga keberlanjutan fungsi ekologis dan keberlangsungan mata pencaharian nelayan tradisional.

2.3 Aktivitas Harian dan Alokasi Waktu Kerja Berbasis Gender

Konstruksi kultural menempatkan perempuan di Kelurahan Untia sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT). Namun, data FPAR menunjukkan adanya beban ganda di ranah domestik dan publik dengan total durasi aktivitas mencapai 17 jam per hari.

PUKUL	IBU	ANAK	BAPAK
05.00	Bangun Tidur Menimba Air di Sumur	Tidur	Bangun Tidur
06.00-07.00	Memasak, Mencuci Baju, dan Cuci Pirin	Bangu tidur siap-siap ke sekolah	Mandi Sarapan
08.00 - 12.00	Mengantar anak ke sekolah Belanja kebutuhan di pasar Menjemur baju	Belajar di sekolah	Bekerja Ke Laut
12.00 - 13.00	Memasak Makan Siang Menjemput anak sekolah	Pulang sekolah	Istirahat Makan Siang
13.00 - 15.00	Tidur Siang (Istirahat) Sholat	Tidur Siang (Istirahat) Sholat	Kembali Bekerja
15.00 - 18.00	Angkat Jemuran Memasak Makan Malam Melipat Pakaian	Mengaji Bermain Menonton	Pulang Kerja Nyantai
18.00 - 20.00	Menyiapkan Makan Malam Istirahat Menonton Membantu anak mengerjakan PR sekolah	Makan Malam Mengerjakan PR Sekolah Menonton TV	Nonton Minum Kopi Merokok
21.00 - 22.00	Menjaga Anak Menidurkan Anak	Tidur	Tidur

Data alokasi waktu menunjukkan perempuan nelayan memulai aktivitas sejak pukul 05.00 WITA dan baru beristirahat pada pukul 22.00 WITA. Jam kerja ini melebihi jam kerja sektor formal dan berlangsung tanpa jeda akibat tidak tersedianya fasilitas publik pendukung di pemukiman

2.4 Kalender Musim Biologis dan Struktur Rantai Nilai Perikanan

Ekonomi Kelurahan Untia bergantung pada siklus musiman laut. Data menangkap 12 komoditas utama sepanjang tahun (Bulan 1–12) yang dikategorikan ke dalam tiga pola pemanfaatan: Jual (J), Makan (M), dan Olahan (O).

JENIS TANGKAPAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	MANFAAT			KERJA	
													J	O	M	P	L
Ikan Katamba	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg	60 kg	60 kg	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg	✓	-	✓	✓	✓
Ikan Bandeng	150 kg	150 kg	170 kg	140 kg	50 kg	50 kg	50 kg	20 kg	30 kg	100 kg	150 kg	150 kg	✓	-	✓	✓	✓
Kerang (tude)	2 Ton	2 Ton	2 Ton	2 Ton	2,5 Ton	3 Ton	3,5 Ton	3,5 Ton	3,5 Ton	4 Ton	4 Ton	4 Ton	✓	-	✓	✓	✓
Kepiting	200 kg	200 kg	200 kg	250 kg	350 kg	300 kg	350 kg	350 kg	400 kg	400 kg	400 kg	400 kg	✓	-	✓	✓	✓
Cumi-Cumi	200 kg	150 kg	150 kg	150 kg	200 kg	200 kg	150 kg	150 kg	100 kg	100 kg	200 kg	200 kg	✓	-	✓	✓	✓
Udang	300 kg	300 kg	200 kg	200 kg	150 kg	100 kg	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg	100 kg	200 kg	✓	-	✓	✓	✓
Ikan Tenro	900 kg	900 kg	900 kg	1 Ton	700 kg	500 kg	400 kg	1 Ton	1 Ton	1 Ton	1 Ton	1 Ton	✓	-	✓	✓	✓
Ikan Baronang	300 kg	300 kg	300 kg	350 kg	400 kg	400 kg	200 kg	150 kg	150 kg	300 kg	300 kg	300 kg	✓	-	✓	✓	✓
Kakap Putih	300 kg	350 kg	300 kg	400 kg	200 kg	100 kg	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg	✓	-	✓	✓	✓
Ikan Balana	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	✓	-	✓	✓	✓
Ambaring	500 kg	500 kg	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg	20 kg	20 kg	1 Ton	1 Ton	1 Ton	✓	-	✓	✓	✓
Ikan Gulana	50 kg	50 kg	40 kg	30 kg	30 kg	20 kg	20 kg	20 kg	30 kg	40 kg	40 kg	40 kg	✓	-	✓	✓	✓

NO	KOMODITAS TANGKAPAN	VOLUME/KARAKTERISTIK TREN	FUNGSI(J / M / O)	KETERLIBATAN KERJA
1	Ikan Katamba	Stabil (50 – 60 kg / bulan)	Jual (J) & Makan (M)	Laki-laki & Perempuan
2	Ikan Balana	Stabil (Konsisten 300 kg / bulan)	Jual (J) & Makan (M)	Laki-laki & Perempuan
3	Kerang (Tude)	Musiman: 2 Ton (awal tahun) s.d 4 Ton (Okt-Des)	Jual (J) & Makan (M)	Laki-laki & Perempuan
4	Ikan Tenro	Fluktuatif: 1 Ton (Apr & Agu-Des), drop 400 kg (Jul)(Jul)	Jual (J) & Makan (M)	Laki-laki & Perempuan
5	Ambaring	Ekstrem: 500 kg (awal tahun), 1 Ton (akhir tahun), drop 20 kg (Agu-Sep)	Jual (J) & Makan (M)	Laki-laki & Perempuan
6	Kakap Putih	Menurun drastis: 400 kg (Apr) menjadi 10 kg/bulan (Jul-Des)	Jual (J) & Makan (M)	Laki-laki & Perempuan

Catatan:

Pemanfaatan Hasil Tangkapan

Enam komoditas lain (Ikan Putih, Kembung, Kepiting, Cumi-cumi, Udang, dan Baronang) mengikuti fluktuasi musiman serupa.

Dari aspek manfaat, seluruh 12 jenis hasil tangkapan di pesisir Untia memiliki pola pemanfaatan yang seragam. Komoditas tersebut dialokasikan untuk dua fungsi utama:

- Jual (J): Sebagian besar hasil tangkapan langsung dijual ke pasar untuk menjadi sumber pendapatan utama keluarga.
- Makan (M): Sebagian disisihkan untuk dikonsumsi sendiri sebagai pemenuh kebutuhan pangan harian dan sumber protein domestik.
- Olahan (O): Berdasarkan infografis, saat ini belum ada satupun jenis tangkapan yang masuk ke dalam proses pengolahan pasca-panen (seluruh kolom 'O' bermakna minus atau kosong).

Ketiadaan Hilirisasi Produk (Kolom O): Data menunjukkan seluruh kolom 'O' (Olahan) bernilai kosong (minus). Belum ada satupun jenis tangkapan yang mengalami proses pengolahan pasca-panen bernilai tambah di Kelurahan Untia. Seluruh komoditas langsung diserap pasar dalam bentuk mentah atau dikonsumsi langsung.

Pembagian Kerja Gender: Sektor penangkapan di laut lepas dilakukan oleh laki-laki (L). Namun, pasca perahu bersandar di dermaga, perempuan nelayan (P) langsung mengelola rantai nilai berikutnya: memilah jenis ikan, membersihkan hasil tangkapan, dan memisahkan porsi konsumsi rumah tangga. Proses negosiasi harga skala besar dan distribusi ke pasar luar tetap didominasi laki-laki.

Sementara itu, rencana reklamasi dinilai sebagai ancaman baru bagi wilayah tangkap nelayan. Reklamasi bukan sekadar membangun daratan di atas air, melainkan memutus rantai ekosistem laut dangkal. Merujuk pada analisis WALHI Sulsel mengenai dampak proyek pesisir Makassar, berikut adalah ancaman nyata yang akan memperparah kondisi nelayan Untia:

Lenyapnya Komoditas Utama Pesisir Dangkal: Kerang (Tude) dan udang Ambaring hidup di ekosistem pesisir berpasir dan berlumpur yang dangkal. Penimbunan laut secara langsung akan mengubur habitat Tude. WALHI Sulsel mencatat, pada kasus MNP dan CPI, sedimentasi berat akibat material urukan menyebabkan air keruh dan mematikan biota dasar laut. Target tangkapan 4 ton Tude pada akhir tahun berisiko hilang total.

Hancurnya Tempat Pemijahan Ikan: Hutan mangrove Untia merupakan daerah asuhan (nursery ground) alami bagi komoditas seperti Kakap Putih, Ikan Tenro, dan Kepiting. Perubahan arus air dan pencemaran akibat aktivitas konstruksi pulau buatan akan merusak kualitas air, memicu kematian massal bibit ikan, dan menurunkan volume tangkapan secara permanen.

Dislokasi Wilayah Tangkap: Nelayan tradisional Untia yang menggunakan perahu kecil (jolloro') hanya bisa beroperasi di wilayah pesisir. Ketika wilayah pesisir ditimbun, mereka terpaksa melaut lebih jauh ke laut lepas. Hal ini meningkatkan risiko keselamatan kerja dan membengkakkan biaya operasional (pembelian BBM), yang sering kali tidak sebanding dengan hasil tangkapan yang diperoleh.

Kalender biologis Untia juga mencatat pembagian kerja yang intensif antara Laki-laki (L) dan Perempuan (P) pada seluruh komoditas. Perempuan nelayan Untia memegang kendali penting pasca-tangkapan: mereka memilah hasil laut, membersihkannya, dan membagi alokasi antara kebutuhan konsumsi keluarga (ketahanan pangan) dan komoditas yang siap dijual oleh suami ke pasar.

Jika reklamasi menurunkan volume tangkapan secara drastis, rantai kerja berbasis gender ini akan mengalami tekanan hebat:

1. **Ancaman Kerawanan Pangan Domestik:** Saat hasil laut berkurang, prioritas tangkapan akan dialihkan seluruhnya untuk dijual demi menutupi biaya operasional melaut. Akibatnya, pemenuhan protein mandiri untuk anak dan keluarga (fungsi pangan/makan) akan hilang. Perempuan harus mengeluarkan biaya belanja tambahan untuk membeli lauk-pauk dari luar.
2. **Hilangnya Peran Produktif Perempuan:** Berkurangnya volume komoditas seperti udang Ambaring dan kepiting membuat aktivitas pasca-panen perempuan di darat menyusut atau hilang sama sekali. Kehilangan ruang peran ini melemahkan posisi tawar ekonomi mereka di dalam rumah tangga.
3. **Beban Ganda yang Kian Berat:** Penurunan pendapatan memaksa perempuan pesisir mencari alternatif kerja serabutan di darat demi menopang ekonomi keluarga. Di saat yang sama, tugas-tugas domestik rumah tangga—termasuk mengelola krisis air bersih menahun di Untia—tetap sepenuhnya dibebankan kepada mereka.

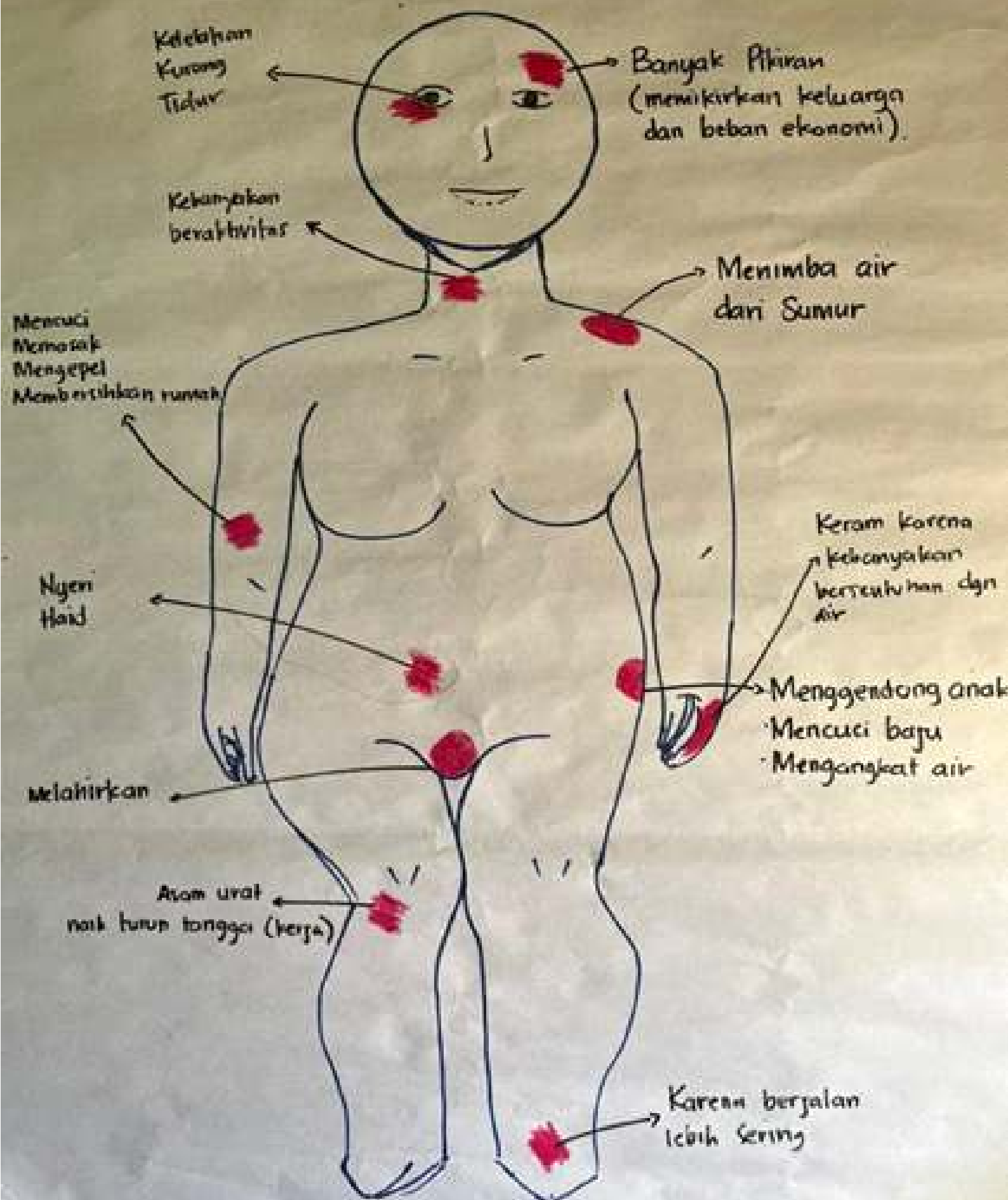
Data WALHI Sulsel di wilayah terdampak reklamasi sebelumnya membuktikan bahwa kemiskinan struktural akibat rusaknya laut selalu menempatkan perempuan pesisir sebagai kelompok yang paling lama mengalami penderitaan ekonomi dan psikologis. Reklamasi di Untia berpotensi besar mengulang kepunahan mata pencaharian yang sama.

2.5 Pemetaan Tubuh (Body Mapping) dan Kerentanan Kesehatan

Kerja fisik berdurasi 17 jam dan beban logistik air bersih berdampak langsung pada penurunan indikator kesehatan fisik perempuan Untia. Hasil pemetaan tubuh mengidentifikasi titik-titik keluhan kronis sebagai berikut:

- **Sistem Saraf Pusat & Psikis (Kepala/Leher):** Kening mengalami keluhan "banyak pikiran" akibat stres pengelolaan ekonomi rumah tangga yang tidak menentu. Mata mengalami kelelahan akut dan kurang tidur akibat jam istirahat yang pendek. Otot leher mengalami ketegangan konstan akibat mobilitas fisik tanpa jeda.
- **Sistem Muskuloskeletal Atas (Bahu & Lengan):** Bahu kiri mengalami sakit kronis akibat aktivitas fisik menimba air sumur. Lengan kanan mengalami nyeri akibat pekerjaan domestik repetitif (mencuci baju manual, memasak, mengepel). Pergelangan dan jari tangan kiri mengalami kram otot akibat kontak air intensif dan beban angkut jerigen/ember air serta menggendong anak.
- **Sistem Reproduksi & Batang Tubuh:** Perut mengalami nyeri haid yang tidak mendapatkan waktu istirahat secara klinis. Area panggul mengalami keluhan pasca melahirkan yang terabaikan akibat keharusan kembali bekerja memenuhi tuntutan ekonomi harian.
- **Sistem Muskuloskeletal Bawah (Kaki):** Lutut mengalami gejala asam urat dan nyeri sendi akibat tekanan beban saat naik-turun tangga pemukiman pesisir. Pergelangan dan telapak kaki mengalami nyeri kronis akibat frekuensi berjalan kaki jarak jauh untuk mengantar-jemput anak serta menghadiri forum advokasi warga.

PEMETAAN TUBUH PEREMPUAN



Hasil pemetaan tubuh (body mapping) terhadap perempuan nelayan di Kelurahan Untia, Kota Makassar, menjadi bukti material bahwa beban kerja domestik dan krisis air bersih selama ini telah memicu kerusakan fisik yang kronis. Sebelum reklamasi berjalan, aktivitas harian dan krisis air bersih menahun telah meninggalkan jejak keluhan kronis pada tubuh perempuan Untia.

Jika rencana reklamasi di pesisir Untia oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan benar-benar direalisasikan, tekanan terhadap tubuh perempuan ini tidak hanya akan memburuk secara biologis, tetapi juga memicu kerentanan psikologis yang mendalam dan sistemik. Ketika proyek reklamasi merusak ekosistem mangrove dan memutus akses wilayah tangkap nelayan tradisional sebagaimana riset dampak reklamasi yang telah dipetakan oleh WALHI Sulsel, perempuan pesisir adalah kelompok pertama yang akan mengalami guncangan psikologis paling berat.

Koneksi antara kehancuran ruang hidup dan beban psikologis ini didukung oleh berbagai literatur ilmiah mengenai ekofeminisme dan kesehatan mental masyarakat pesisir:

1. Solastalgia dan Kehilangan Identitas (Identity Distress)

Reklamasi secara paksa mengubah bentang alam laut yang menjadi ruang hidup warga. Secara ilmiah, kondisi ini memicu solastalgia, sebuah bentuk distress psikologis atau depresi yang dialami seseorang ketika rumah atau lingkungan tempat tinggal mereka berubah secara drastis ke arah kerusakan sementara mereka tidak bisa meninggalkannya (Albrecht et al., 2007). Bagi perempuan Untia, laut dan hutan mangrove bukan sekadar latar pemandangan, melainkan ruang sosial dan kedaulatan pangan. Kehilangan ruang ini akan memicu rasa ketidakberdayaan yang mendalam (learned helplessness) karena ruang hidup mereka dirampas oleh otoritas yang lebih kuat.

2. Tekanan Akut Pengelolaan Krisis Finansial dan Domestik

Dalam studi sosiologi pesisir, perempuan menempati posisi sebagai "manajer krisis" dalam rumah tangga. Ketika pendapatan suami sebagai nelayan anjlok akibat rusaknya ekosistem laut, perempuan harus memikul beban psikologis untuk memastikan seluruh anggota keluarga tetap makan. Berdasarkan studi Gender and Coastal Reclamation Effects, penurunan pendapatan yang dibarengi dengan naiknya pengeluaran untuk membeli air bersih (akibat intrusi air laut pada sumur warga) berkorelasi langsung dengan peningkatan prevalensi kecemasan (anxiety disorder) kronis pada ibu rumah tangga. Ketakutan harian akan ketidakmampuan membeli air dan pangan adalah teror mental yang konstan.

3. Kecemasan Eksistensial Terhadap Ancaman Bencana Fisik

Wawancara sebelumnya menunjukkan bahwa perempuan Untia sangat menyadari peran vital mangrove sebagai pelindung dari hantaman angin utara dan gelombang pasang. Rusaknya mangrove akibat sedimentasi dan perubahan arus proyek akan memicu kecemasan eksistensial (existential anxiety). Setiap kali cuaca buruk atau angin kencang melanda, tingkat stres psikologis mereka akan melonjak tajam karena hilangnya dinding pertahanan alami. Ketakutan bahwa rumah mereka sewaktu-waktu dapat hancur diterjang abrasi menciptakan trauma psikologis yang terus berulang (compounded trauma).

WALHI Sulawesi Selatan. Catatan Akhir Tahun & Riset Dampak Sosial-Ekonomi Reklamasi Pesisir Makassar. (Mendokumentasikan pemiskinan struktural nelayan tradisional dan beban berlapis perempuan pesisir).

2.6 Data Kualitatif Dampak Krisis Air Bersih

Jaringan pipa PDAM Kota Makassar di Kelurahan Untia tidak berfungsi. Kondisi ini memaksa warga membeli air bersih dari pihak swasta (sumur bor komersial dan tandon) demi memenuhi kebutuhan hidup dasar.

Krisis air bersih menjadi persoalan menahun yang dihadapi oleh warga Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Meskipun berada di wilayah pesisir, pemenuhan kebutuhan air bersih di daerah ini memerlukan biaya tinggi akibat tidak berfungsinya jaringan pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Sebagian besar perempuan di Kelurahan Untia, aktivitas harian tidak hanya berputar pada urusan domestik, melainkan juga pada manajemen anggaran yang ketat untuk mendapatkan air bersih. Air yang bersumber dari jaringan PDAM kota tidak mengalir ke rumah-rumah mereka, memaksa warga mencari alternatif lain yang menguras pendapatan keluarga.

Ibu Muna (64), seorang ibu rumah tangga yang telah menetap selama 28 tahun di Untia, menjelaskan bahwa untuk mencuci pakaian, mencuci piring, mandi, hingga mencuci bahan makanan, harus mengkombinasikan penggunaan air sumur dan air tandon. Dalam dua minggu, keluarga Muna menghabiskan rata-rata satu tandon air. Ia biasanya mengeluarkan anggaran sekitar 100 ribu rupiah setiap bulan untuk membeli air.

Kondisi serupa dialami oleh Ibu Bulan (54), yang sudah bermukim selama 20 tahun di kelurahan tersebut bersama suami dan tiga anaknya. Kebutuhan air di rumahnya mencapai satu tandon per minggu. Akibat tiadanya aliran air dari pemerintah, ia harus mengalokasikan dana sebesar 200 ribu rupiah per bulan untuk membeli empat tandon air, di samping penggunaan air sumur dan air galon bermerek.

Pengeluaran yang lebih tinggi dicatatkan oleh Ibu Ros (58), yang sehari-hari menjaga warung di rumahnya. Dengan jumlah anggota keluarga sebanyak enam orang—termasuk suami, dua anak, menantu, dan satu cucu—kebutuhan air di rumahnya mencapai dua tandon per minggu. Dalam sebulan, Ibu Ros merogoh kantong hingga 300 ribu rupiah untuk membeli air dari sumur bor pihak swasta dan air galon untuk keperluan memasak.

Ketiadaan akses air bersih yang merata ini memicu kritik dari warga terkait kehadiran pemerintah. Ibu Muna menyebutkan bahwa perwakilan pemerintah pernah datang melakukan peninjauan fasilitas air, namun program pembagian bantuan air yang dilakukan setelahnya dinilai tidak merata.

Ibu Bulan juga menyampaikan pengalaman serupa. Menurut dia, pemerintah daerah sempat datang meninjau dan menjanjikan bantuan pasokan air melalui armada mobil tangki. Namun bantuan itu tak berkelanjutan, lalu berhenti tanpa memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Bahkan, ada warga yang sama sekali belum pernah melihat adanya perhatian langsung dari otoritas terkait. Muliati (42), ibu rumah tangga dengan empat anak yang sudah 20 tahun tinggal di Untia, menegaskan bahwa wilayahnya belum pernah menerima kunjungan atau peninjauan fasilitas air dari pemerintah. Untuk memenuhi kebutuhan domestik, ia harus membeli air tandon dengan biaya sekitar 140 ribu rupiah per bulan karena pipa PDAM sama sekali belum menjangkau kediamannya.

Selain persoalan air bersih, keberadaan ekosistem lingkungan berupa hutan mangrove menjadi perhatian penting bagi keberlangsungan hidup warga pesisir Untia. Keempat perempuan tersebut sepakat bahwa tanaman mangrove memiliki peran krusial dalam melindungi kawasan tempat tinggal mereka dari ancaman fisik laut berupa kenaikan gelombang dan cuaca buruk.

Muliati menjelaskan bahwa mangrove berfungsi sebagai penahan intrusi air laut dan pelindung dari bahaya angin kencang yang kerap melanda wilayah pesisir. Penilaian ini diperkuat oleh Ibu Ros yang merasakan dampak langsung dari keberadaan mangrove tersebut.

"Mangrove sangat penting untuk perlindungan masyarakat terhadap angin kencang dan pasang air laut yang tidak diketahui kapan datangnya," jelas Ibu Ros.

Bagi komunitas pesisir Kelurahan Untia, keberadaan hutan mangrove bukan sekadar pelengkap ekosistem, melainkan dinding pertahanan utama yang menjaga rumah-rumah mereka dari hantaman ombak dan angin. Namun, perlindungan alam ini belum dibarengi dengan pemenuhan hak dasar mereka atas air bersih, yang hingga kini masih harus mereka beli dengan harga tinggi.

PROFIL PENGELUARAN AIR BERSIH BULANAN WARGA UNTIA

Ibu Muna (64 tahun, warga selama 28 tahun)

└— Konsumsi: 1 tandon / 2 minggu (2 tandon/bulan) + air sumur

└— Biaya: Rp100.000 / bulan

Ibu Bulan (54 tahun, warga selama 20 tahun, 5 anggota keluarga)

└— Konsumsi: 1 tandon / minggu (4 tandon/bulan) + air sumur + gallon

└— Biaya: Rp200.000 / bulan

Ibu Ros (58 tahun, pemilik warung, 6 anggota keluarga)

└— Konsumsi: 2 tandon / minggu (8 tandon/bulan) + air galon memasak

└— Biaya: Rp300.000 / bulan (Sumber: sumur bor swasta)

Muliati (42 tahun, warga selama 20 tahun, 4 anak)

└— Konsumsi: Air tandon eceran (Pipa PDAM belum menjangkau)

└— Biaya: Rp140.000 / bulan

Evaluasi Kinerja Pemerintah: Warga memberikan indikasi bahwa intervensi pemerintah tidak konsisten. Ibu Muna menyatakan peninjauan fasilitas telah dilakukan, namun distribusi bantuan air pasca peninjauan tidak merata. Ibu Bulan menyatakan pemerintah pernah menjanjikan pasokan air berkelanjutan menggunakan armada mobil tangki, namun operasionalnya berhenti tanpa kejelasan. Muliati menegaskan bahwa di wilayah spesifik tempat tinggalnya, belum pernah ada kunjungan resmi maupun bantuan air dari otoritas terkait.

Rencana reklamasi di Pesisir Untia-Lantebung sama halnya dengan reklamasi sebelumnya seperti Makassar New Port (MNP) dan Center Point of Indonesia (CPI) untuk pembangunan kawasan komersial di sekitarnya. Dimana hal ini kemudian secara drastis telah mengubah bentang alam dan memicu perubahan ruang hidup. Pembangunan masif ini tidak hanya menggusur wilayah kelola nelayan tradisional, tetapi juga memperparah krisis lingkungan struktural. Pertumbuhan penduduk

urban yang cepat menuntut pasokan air yang lebih besar. Namun, masalah mendasarnya bukan sekadar keterbatasan volume air baku secara absolut, melainkan kekeliruan dalam prioritas alokasi tata kelola air. Riset WALHI Sulawesi Selatan (2024) menemukan adanya paradoks spasial yang mencolok dalam distribusi air PDAM di Kota Makassar:

- **Kawasan Makassar Utara (Kecamatan Tallo, Kelurahan Buloa, Kaluku Bodoa):** Wilayah padat penduduk yang bertetangga langsung dengan proyek industri pesisir ini justru menerima volume air yang sangat minim. Akibatnya, warga di Kecamatan Tallo harus mengalami krisis air bersih menahun selama kurang lebih 20 tahun.
- **Kawasan Makassar Barat:** Wilayah ini dipadati oleh pusat bisnis komersial, hotel, perkantoran, dan industri jasa. Meskipun jumlah pelanggan domestiknya (rumah tangga) jauh lebih sedikit dibanding wilayah utara, volume air bersih yang dialirkan oleh PDAM ke wilayah barat ini justru sangat besar.

Hal ini mempertegas fakta bahwa pemukiman komersial dan sektor industri skala besar diistimewakan dalam akses layanan dasar, sementara wilayah pemukiman warga urban marginal diposisikan di urutan paling belakang. Kondisi eksisting inilah yang kemudian akan memperparah akses masyarakat Untia-Lantebung ketika adanya lahan baru (reklamasi) yang diperuntukkan untuk wilayah komersial seperti perumahan atau properti mewah

2.7 Fungsi Ekologis Mangrove sebagai Proteksi Fisik

Meskipun pemenuhan hak atas air bersih minim, keempat informan kunci (Ibu Muna, Ibu Bulan, Ibu Ros, dan Muliati) sepakat bahwa ekosistem hutan mangrove di Untia merupakan struktur pertahanan fisik utama yang tersisa.

- Muliati mengidentifikasi mangrove sebagai penahan intrusi air laut ke sumur warga dan pemecah angin kencang.
- Ibu Ros menegaskan bahwa keberadaan vegetasi mangrove melindungi pemukiman dari dampak langsung angin kencang serta pasang air laut yang fluktuasinya tidak dapat diprediksi akibat perubahan cuaca buruk.
- Temuan ini menegaskan bahwa rencana reklamasi 1.440 hektare yang berpotensi merusak hutan mangrove akan menghilangkan fungsi proteksi alami yang diamanatkan oleh Pasal 8 dan Pasal 40 Perda RTRW No. 3 Tahun 2022.

Selain air, ruang hidup mereka sangat bergantung pada ekosistem mangrove. Bagi keempat perempuan tersebut, mangrove bukan sekadar tumbuhan pantai, melainkan dinding pertahanan fisik yang melindungi pemukiman mereka dari cuaca ekstrem.

"Mangrove sangat penting untuk perlindungan masyarakat terhadap angin kencang dan pasang air laut yang tidak diketahui kapan datangnya," urai Ibu Ros.

Muliati menambahkan bahwa hutan mangrove berfungsi menahan intrusi air asin serta meredam hantaman angin kencang yang kerap melanda wilayah utara tersebut.

Proyeksi Dampak Reklamasi: Meskipun proyek pulau buatan direncanakan terpisah dari garis pantai, perubahan arus laut dan sedimentasi akibat reklamasi dapat mengganggu sirkulasi air yang dibutuhkan hutan mangrove untuk tumbuh. Kematian atau pengurangan luasan mangrove akan menghilangkan fungsi perlindungan ini.

Bagi perempuan Untia, hilangnya mangrove berarti meningkatnya kerentanan terhadap bencana. Mereka harus menghadapi ancaman abrasi, banjir rob, dan kerusakan rumah tinggal secara langsung, sementara kapasitas ekonomi mereka sudah terkuras habis untuk membeli air bersih sehari-hari. Reklamasi di Untia bukan sekadar mengubah bentang laut, melainkan memperparah kemiskinan struktural yang sasarannya adalah perempuan pesisir.



A vertical strip of three photographs is located on the left side of the page. The top photo shows a person in a blue hijab and a blue shirt. The middle photo shows a person in a blue shirt. The bottom photo shows a person in a blue shirt.

Bagian III

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan riset partisipatif yang dilakukan, maka laporan ini memberikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

A. Kesimpulan

- 1. Ketidaksesuaian Regulasi dan Realitas:** Rencana proyek reklamasi seluas 1.440 hektare di Untia bertentangan dengan mandat Pasal 6 (Mitigasi Bencana) dan Pasal 8 (Konservasi Mangrove) Perda RTRW Sulawesi Selatan No. 3 Tahun 2022, karena mengancam benteng alami masyarakat dari banjir rob dan angin kencang.
- 2. Beban Gender Ganda Kronis:** Pendekatan FPAR membuktikan perempuan Untia bekerja 17 jam sehari, memikul beban domestik sekaligus pemenuhan kebutuhan publik (air bersih) yang berdampak langsung pada kerusakan fisik di sekujur tubuh (body mapping).
- 3. Kemiskinan Struktural akibat Kegagalan Infrastruktur:** Tidak berfungsinya pipa PDAM memaksa warga mengeluarkan biaya tambahan antara Rp100.000 hingga Rp300.000 per bulan hanya untuk membeli air bersih. Angka ini memotong pendapatan nelayan yang tidak menentu dan berfluktuasi secara musiman tanpa adanya proses pengolahan pasca-panen (kolom 'O' kosong)

B. Rekomendasi

1. Perlindungan Wilayah Tangkap dan Moratorium Reklamasi

- **Penerapan Moratorium Reklamasi Pesisir Utara:** Menghentikan atau merevisi rencana proyek reklamasi di kawasan pesisir utara Kota Makassar yang berpotensi memutus akses nelayan tradisional dan merusak ekosistem mangrove serta tempat pemijahan ikan.
- **Pengakuan Legal Ruang Tangkap Nelayan Tradisional:** Memasukkan kawasan pesisir dan laut Untia sebagai Kawasan Tangkap Nelayan Tradisional dan Kawasan Perlindungan Ekosistem Pesisir dalam RTRW Kota Makassar dan RTRW Terintegrasi Provinsi Sulawesi Selatan

2. Peningkatan Infrastruktur Dasar yang Responsif Gender

- **Jaminan Akses Air Bersih Berkualitas:** Membangun dan melengkapi jaringan pemipaan PDAM yang terintegrasi ke pemukiman nelayan Untia, guna menekan beban domestik dan finansial yang selama ini ditanggung oleh perempuan pesisir.
- **Perbaikan Penataan Pemukiman dan Sanitasi:** Menyediakan infrastruktur sanitasi yang layak, sistem pengelolaan sampah terpadu di kawasan pesisir, serta perbaikan jalan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan.
- **Infrastruktur Pendukung Penanggulangan Bencana Pesisir:** Melakukan restorasi sabuk hijau mangrove (mangrove belt) secara partisipatif untuk memitigasi abrasi serta dampak perubahan iklim.

3. Pengakuan dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Pesisir

- **Pengakuan Legal Identitas Perempuan Nelayan:** Memfasilitasi penerbitan Kartu KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan) khusus bagi perempuan pesisir di Untia yang bergerak di pengolahan dan pemasaran hasil laut, agar mereka memiliki akses setara terhadap bantuan sosial, asuransi perikanan, dan modal usaha.
- **Dukungan Fasilitas Pengolahan dan Pemasaran:** Menyediakan sarana pascapanen yang higienis, unit pendingin (cold storage), serta pelatihan inovasi produk hasil laut yang dikelola secara kolektif oleh kelompok perempuan.

4. Pelibatan Partisipatif dan Berperspektif Gender dalam Pengambilan Keputusan

- **Musrenbang Tematik Perempuan dan Pesisir:** Mewajibkan ruang Musrenbang khusus atau mekanisme konsultasi publik yang menjamin keterlibatan aktif perempuan pesisir Untia dalam penentuan kebijakan pembangunan wilayah pesisir.
- **Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang Partisipatif:** Mengintegrasikan kajian dampak sosial dan analisis gender (Gender Impact Assessment) secara transparan dalam setiap rencana analisis mengenai dampak lingkungan untuk proyek pembangunan pesisir.

Diterbitkan oleh

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan
Jalan Aroepala, Kompleks Permata Hijau Lestari, Blok Q1 No.8, Makassar
Indonesia

+628229 393 9591

+62411 467 1368

walhisulsel@gmail.com

www.walhisulsel.or.id

Both ENDS

Nobelstraat 4

3512 EN Utrecht

The Netherlands

info@bothends.org

